



RAPAT KOORDINASI

**PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI**

Senin, 20 Oktober 2025

**TPID KOTA BANJARBARU
TAHUN 2025**

UNDANGAN RADIOGRAM

 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA						
FORMULIR BERITA				Register No :		
PANGGILAN	JENIS	NOMOR	DERAJAT			
DARI : MENTERI DALAM NEGERI UNTUK : YTH. 1. GUBERNUR SELURUH INDONESIA 2. BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA TEMBUSAN : YTH. MENTERI DALAM NEGERI						
KLASIFIKASI : SANGAT SEGERA Nomor : 500.2.3/7410/SJ						
DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2025 KMA AKAN DILAKS RAPAT KOORDINASI KURBUK RAKOR KURTUP YG DIRANGKAIKAN DGN ARAHAN MENTERI KEUANGAN TERKAIT PERCEPATAN REALISASI BELANJA UTK MENJAGA PERTUMBUHAN EKONOMI TTK SEHUB DGN HAL TSB KMA DGN INI DISAMPAIKAN HALS SBB TTK DUA AAA TTK RAKOR DIMAKSUD DILAKS SCR ONLINE PD HARI SENIN TGL 20 OKTOBER 2025 PKL 08.00 SD 10.00 WIB MELALUI APLIKASI ZOOM MEETING DGN MEETING ID 677 057 3756 PASSWORD INFLASI KMA DGN FORMAT PENULISAN AKUN NAMA DAERAH GARING INSTANSI_JABATAN_NAMA PEJABAT KMA SERTA KANAL YOUTUBE KEMENDAGRI RI KMA YG DIPIMPIN OLEH MENTERI DALAM NEGERI TTK KMA BBB TTK RAKOR TERSEBUT DIATAS AKAN DILANJUTKAN DENGAN RAKOR PENGENDALIAN HARGA BERAS BERTEMPAT DI BADAN PANGAN NASIONAL PADA PUKUL 10.00 WIB MELALUI APLIKASI ZOOM MEETING DGN MEETING ID 954 1149 3022 PASSWORD 076280 TTK KMA CCC TTK BERKENAAN DGN HURUF AAA KMA DIMINTA KPD TTK DUA SATU TTK GUBERNUR SELURUH INDONESIA UTK HADIR SCR ONLINE DAN TIDAK DIWAKILKAN BERSAMA FORKOPIMDA PROV KMA PIMWIL BULOG PROV KMA KA BAPPEDA PROV KMA KA BAPENDA PROV KMA KA BPKAD PROV KMA KADIN DAN KA PERANGKAT DAERAH YG MEMBIDANGI URUSAN PERTANIAN KMA KETAHANAN PANGAN KMA PERIZINAN KMA PERDAGANGAN DAN KEUANGAN TTK KMA DUA TTK BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA UTK HADIR SCR ONLINE DAN TIDAK DIWAKILKAN BERSAMA FORKOPIMDA KAB GARING KOTA KMA KA KEPOLISIAN RESOR KMA PIMCAB BULOG KAB GARING KOTA KMA KA BAPPEDA KAB GARING KOTA KMA KA BAPENDA KAB GARING KOTA KMA KA BPKAD KAB GARING KOTA KMA KADIN DAN KA PERANGKAT DAERAH YG MEMBIDANGI URUSAN PERTANIAN KMA KETAHANAN PANGAN KMA PERDAGANGAN DAN KEUANGAN TTK KMA TIGA TTK KPD GUBERNUR KMA BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA BERSAMA PENDAMPING SEBAGAIMANA TSB DI ATAS UTK HADIR SCR ONLINE DAN TIDAK DIWAKILKAN PD DUA KEGIATAN RAKOR TSB DIATAS TTK KMA DDD TTK UTK INFORMASI LEBIH LANJUT DPT MENGHUB DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI UP DIREKTORAT SUPD III KMA MELALUI SDR IMANUEL 082118800730 DAN SDRI NADIA 081343047244 TTK KMA EEE TTK DUM TTK HBS						
TANGGAL PEMBUATAN 16 Oktober 2025						
Pengirim : a.n. MENTERI DALAM NEGERI SEKRETARIS JENDERAL		No. Kode	Waktu/pukul		Lalu Lintas	Paraf Operator
Nama :  Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh : Sekretaris Jenderal Tomsir Tohir	Terima		Kirim			
Tanda Tangan						

DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR

Acara : Rakor Inflasi via Zoom

Hari/Tanggal : Senin / 20 Okt 2025

NO	NAMA	INSTANSI/SKPD	L/P	TANDA TANGAN
1	Sri Hartana	Asisten 2	P	1
2	Padilurrahman A.	Eko SDA		2
3	Edy R. Hmadi	BAJ	L	3
4	Komang. A. Rudi.	BPPRD.		4
5	Edy Satrio	Dyland		5
6	Ika Hermine	Dkep3		6
7	Siti Fauziah	Bapperida		7
8	Resita	Bapperida		8
9	Sellamitha R.	SPKAD	P	9
10	Rusnani	Itko	P	10
11	Devy (Kang)	BPPRD	L	11
12	Agustini	BPPRD	L	12
13	Indra A.	---	L	13
14	Imam Fitri C	BKOROPM	L	14
15	Wicak. D	Diskopungahan	P	15
16	Dian Yulia A	Bag. Eko SDA		16
17	MIMA	Eko SDA	P	17
18	Endang Dwi Anug	---	P	18
19	SYAPRUSIN	---	L	19

NOTULEN RAPAT



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU SEKRETARIAT DAERAH

Alamat Kantor : Jalan. Panglima Batur Nomor 1 Banjarbaru Kalsel Telp. (0511) 477256

NOTULEN RAPAT KOORDINASI TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

- I. Dasar : Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor: 500.2.3/7410/SJ Tanggal 16 Oktober 2025
- II. Maksud dan Tujuan : Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Tahun 2025
- III. Peserta : 1. Menteri Dalam Negeri
2. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia
- IV. Waktu dan Tempat : Senin, 20 Oktober 2025 pukul 09.00 WITA
Via *Zoom Meeting* yang dilaksanakan di Aula BPKAD Kota Banjarbaru
- V. Hasil : 1. **KEMENTRIAN DALAM NEGERI**
- a) Pada Rapat Koordinasi Analisis dan Evaluasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, memaparkan kondisi terkini pelaksanaan APBD di seluruh daerah. Total uang pemerintah tahun 2025 tercatat sebesar Rp2.701,4 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Pemerintah pusat menekankan pentingnya optimalisasi belanja pemerintah sebagai instrumen utama untuk menggerakkan perekonomian nasional, memperkuat daya beli masyarakat, serta meningkatkan konsumsi rumah tangga yang menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
 - b) Dari sisi pendapatan daerah, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi sebesar 29,75% dari total pendapatan, sedangkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah mencapai 69,33%. Kondisi ini mengindikasikan masih tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat. Meskipun demikian, realisasi pendapatan daerah menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga triwulan ketiga tahun 2025, rata-rata realisasi pendapatan mencapai 70,01% untuk provinsi, 70,19% untuk kabupaten, dan 71,12% untuk kota. Namun, realisasi belanja daerah masih berada pada kisaran 55–57%, yang menunjukkan perlunya percepatan pelaksanaan kegiatan dan program pembangunan di daerah.
 - c) Analisis kapasitas fiskal daerah mengungkapkan bahwa ketimpangan fiskal antarwilayah masih cukup signifikan. Dari total 546 pemerintah daerah yang terdiri atas 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, sebanyak 493 daerah atau 90% dikategorikan memiliki kapasitas fiskal lemah. Hanya 26 daerah (5%) yang memiliki kapasitas fiskal kuat, dan 27 daerah (5%) berada pada kategori sedang. Di tingkat provinsi, sekitar 39% tergolong lemah, sementara pada tingkat kabupaten hampir seluruhnya (98%) masih bergantung pada pendapatan transfer pusat. Hal ini menegaskan perlunya strategi yang lebih terarah dalam memperkuat basis penerimaan asli daerah.
 - d) Dari sisi pengelolaan kas daerah, data Bank Indonesia menunjukkan bahwa total simpanan pemerintah daerah di perbankan per posisi September 2025 mencapai sekitar Rp234 triliun, dengan porsi terbesar dalam bentuk giro dan deposito. Provinsi DKI Jakarta tercatat sebagai daerah dengan simpanan tertinggi sebesar Rp14,68 triliun, sedangkan simpanan terendah tercatat di Provinsi Sulawesi Barat

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

sebesar Rp150 miliar. Berdasarkan laporan Kementerian Dalam Negeri hingga 17 Oktober 2025, dana kas yang masih tersedia di rekening pemerintah daerah mencapai sekitar Rp281 triliun. Kondisi ini mengindikasikan masih terdapat ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat realisasi belanja daerah dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik.

- e) Secara keseluruhan, hasil analisis dan evaluasi menunjukkan bahwa meskipun kinerja pendapatan daerah mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, tantangan utama tetap terletak pada optimalisasi realisasi belanja dan peningkatan kapasitas fiskal daerah. Menteri Dalam Negeri menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penyerapan anggaran, mengoptimalkan PAD melalui inovasi kebijakan dan digitalisasi pajak daerah, serta memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan produktif. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan fiskal daerah serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional secara berkelanjutan.

2. KEMENTERIAN KEUANGAN

- a) Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah menyampaikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia pada tahun 2025 tetap kuat dengan stabilitas makroekonomi yang terjaga. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen pada triwulan II-2025, inflasi rendah di angka 2,65 persen (yoy September 2025), serta neraca perdagangan yang tumbuh 45,8 persen secara kumulatif tahunan. Pemerintah terus menggerakkan tiga mesin utama pertumbuhan—yakni kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan iklim investasi—secara sinergis untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
- b) Dalam konteks peran fiskal daerah, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2025 meningkat hingga Rp644,9 triliun atau 74,2 persen dari pagu anggaran. Namun demikian, realisasi belanja pemerintah daerah masih lebih lambat dibandingkan tahun 2024, dengan capaian rata-rata 51,3 persen hingga akhir September 2025. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya dana simpanan pemerintah daerah di perbankan hingga mencapai Rp234 triliun. Menteri Keuangan menekankan pentingnya percepatan realisasi belanja yang berkualitas agar dana publik tidak mengendap di bank dan dapat segera berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan pelayanan publik di daerah.
- c) Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara nasional mengalami kontraksi sebesar 10,86 persen dibandingkan tahun sebelumnya, turun dari Rp284,22 triliun menjadi Rp253,36 triliun per September 2025. Penurunan ini disebabkan oleh kebijakan penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk penyerahan kendaraan kedua dan seterusnya, penurunan dividen BUMD, serta perubahan pencatatan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Walaupun demikian, beberapa komponen seperti retribusi daerah masih menunjukkan pertumbuhan positif. Pemerintah mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat basis PAD melalui pengembangan aktivitas ekonomi produktif dan peningkatan kualitas layanan publik.
- d) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pengelolaan fiskal daerah yang efisien dan berintegritas merupakan kunci dalam menjaga kepercayaan publik serta stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah daerah diimbau untuk mengelola dana secara optimal, mempercepat realisasi belanja dengan prinsip efektif dan akuntabel, serta menjaga keseimbangan antara penerimaan, belanja, dan

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

simpanan di perbankan. Upaya sinergis antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, menjaga stabilitas harga dan inflasi, serta memperkuat ketahanan fiskal di seluruh wilayah Indonesia.

REKOMENDASI TINDAK LANJUT TPID KOTA BANJARBARU

- 1) **Perkuat koordinasi lintas sektor** (TPID, OPD, BI, dan pelaku usaha) untuk menjaga stabilitas harga, memperlancar distribusi barang, serta memastikan ketersediaan pasokan komoditas pangan utama seperti beras, cabai, dan bawang merah.
- 2) **Percepat realisasi belanja APBD**, khususnya belanja modal dan kegiatan produktif yang berdampak langsung pada perekonomian daerah, sambil meminimalkan dana mengendap di rekening pemerintah daerah.
- 3) **Optimalkan operasi pasar dan kerja sama perdagangan antar daerah**, guna menjaga keterjangkauan harga dan memperkuat ketahanan pasokan di wilayah Banjarbaru.
- 4) **Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)** melalui intensifikasi pajak dan retribusi berbasis digital, serta penguatan kinerja BUMD dan aset daerah agar lebih produktif.
- 5) **Fokus pada belanja yang berkualitas dan tepat sasaran**, dengan mengutamakan program yang mendukung ketahanan pangan, pengendalian inflasi, dan pelayanan publik.
- 6) **Perkuat tata kelola dan integritas keuangan daerah**, dengan memastikan setiap kebijakan fiskal dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
- 7) **Lakukan pemantauan dan evaluasi inflasi secara rutin**, serta tindak lanjut cepat terhadap potensi tekanan harga di pasar lokal.
- 8) **Dukung program nasional seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG)** sebagai bagian dari strategi menjaga daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi dari sisi permintaan.

Demikian disampaikan dan untuk menjadi bahan selanjutnya.

Pembuat



DIAN YUDHA ASTUTI, SE

NIP. 197803042009012001

FILE FOTO (20 Oktober 2025)



Dokumentasi kegiatan Rakor Inflasi (via zoom meeting) dengan Kemendagri di Aula BPKAD yang dihadiri oleh TPID Kota Banjarbaru